

**STRATEGI PEMERINTAH KOREA SELATAN DALAM MENGATASI KRISIS  
DEMOGRAFI DI ERA MOON JAE IN**  
*South Korean Government's Strategy in Overcoming the Demographic Crisis in the Moon  
Jae In Era*

**Marlina Ramadhanti Wardani**

marlinadanty@gmail.com

Pembimbing: Dr. Sugeng Riyanto

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

**Abstarct**

*This thesis explains the phenomenon of the demographic crisis that occurred in South Korea and President Moon Jae In's strategy in overcoming the crisis. This issue has been a major concern in policy making by the South Korean government until the era of the Moon Jae In government because no effective solution has yet been found to deal with the crisis. Using human development theory that tries to shape human-oriented development, Moon Jae In seeks to change the previous president's strategy by changing the direction of policy to focus on improving the quality of life of each generation. Moon Jae In's strategy will focus on the human resources approach by improving the quality of life of the population in South Korea, reforming the structure of military power, and gender equality. This research uses the Library Research method. The data is obtained from internet media such as journals, articles, books, official websites and news sites, as well as various other references.*

***Keywords: South Korea, Demographic Crisis, Population Crisis, Moon Jae In, Human Development Theory.***

## Pendahuluan

Sejak tahun 1960, Korea Selatan mulai mengalami kurangnya populasi penduduk atau krisis demografi. Isu ini telah menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Korea Selatan hingga era pemerintahan Moon Jae In karena belum ditemukan penyelesaian yang efektif untuk menangani krisis tersebut. Krisis demografi yang terjadi di Korea Selatan disebabkan oleh kurangnya penduduk usia produktif di Korea Selatan. Hal tersebut dapat terjadi karena biaya hidup yang tinggi, jam kerja yang panjang ditambah lagi dengan gaya hidup yang kompetitif membuat mereka enggan untuk memiliki keturunan (Quick, 2019).

Krisis demografi di Korea Selatan disebabkan karena Korea Selatan tengah mengalami periode *Total Fertility Rates* (TFR) ultra-rendah (atau 'terendah-rendah') di bawah 1,3. Dalam empat dekade, Korea Selatan telah mengalami transisi yang cepat dari negara dengan tingkat kesuburan tinggi menjadi negara dengan tingkat kesuburan terendah secara global. Periode TFR turun dari 6,3 pada 1955-1960 menjadi tingkat sub-penempatan pada tahun 1984, dan kemudian ke tingkat terendah-rendah, di bawah 1,3, sejak tahun 2001, dan terendah di 1,08 pada tahun 2005. Sejalan dengan penurunan kesuburan yang bergerak cepat, "Transisi penundaan" telah terjadi sejak awal 1980-an, dengan angka umur pernikahan dan kelahiran

bergeser ke usia yang lebih tinggi. Akibatnya, usia rata-rata ibu pada kelahiran pertama telah meningkat lebih dari enam tahun, mencapai 31 tahun pada 2014 yang merupakan level tertinggi di antara negara-negara besar secara global (Yoo, 2018).

Sejak tahun 2006 pemerintah telah menghabiskan dana sekitar 152.9 triliun won (\$135.65 miliar) untuk subsidi keluarga dan anak sejak lahir hingga masuk ke jenjang universitas (Ramstad, 2019). Kemudian, pada masa pemerintahan Park Geun Hye pada tahun 2016, Park Geun Hye meluncurkan website yang memberikan data statistik wanita usia subur, data pernikahan dan kelahiran dari tiap kota dan wilayah. Strategi tersebut dilaksanakan Park Geun Hye dengan harapan meningkatkan persaingan dalam hal reproduksi antar wilayah. Strategi tersebut tidak berujung baik dengan ditutupnya website tersebut karena keluhan wanita di Korea Selatan yang menganggap Park Geun Hye hanya melihat wanita sebagai "pabrik pembuat bayi" (Roh J. , 2019).

Strategi dan dana yang diberikan oleh presiden sebelumnya tidak memberi efek perbedaan terhadap krisis demografi di Korea Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dirilis pada Maret tahun 2019 oleh Statistik Korea yang melaporkan bahwa populasi di Korea Selatan dapat mencapai puncaknya pada sekitar 51 Juta tahun 2019, sebelum turun seperti pada tahun 1972 pada angka sekitar 34 Juta pada tahun 2067. Pada tahun 2017 hanya

14% populasi Korea Selatan yang berusia 65 tahun keatas. Proporsi penduduk usia kerja pada umur 15-64 tahun adalah 73%, tetapi angka tersebut dapat menyusut menjadi hanya 46% pada tahun 2065 menempatkan penduduk usia kerja di Korea Selatan di bawah rasio Jepang yaitu 51% (Fensom, 2019).

Terus menurunnya populasi di Korea Selatan memiliki implikasi jangka panjang. Dalam bidang ekonomi, kurangnya populasi penduduk di usia efektif menghadapi Korea Selatan dengan tingkat kemiskinan usia tua tertinggi diantara negara lain di *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, yang kemudian menyebabkan Korea Selatan akan menghadapi tekanan pada keuangannya untuk membayar populasi yang menua dengan pekerja muda yang lebih sedikit untuk menanggung beban. Ketika populasinya mulai berkurang, potensi laju pertumbuhan ekonomi Korea Selatan juga akan mulai menurun. Menurut laporan baru-baru ini oleh *Moody's Investment Service*, efek dari pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan peningkatan utang akan mulai berdampak pada Korea Selatan pada tahun 2030-an, dengan implikasi pada aspek kedaulatan jangka panjang Korea Selatan dan kekuatan fiskal. (Fensom, 2019)

Konsekuensi dari penurunan populasi tidak hanya berakibat dalam bidang pendidikan dan ekonomi saja,

Korea Selatan saat ini memiliki salah satu militer terbesar di dunia dengan jumlah 600.000 tentara (Stangarone, 2018). Namun, karena jumlah laki-laki muda yang memenuhi syarat untuk layanan militer menyusut, Korea Selatan akan ditekan untuk mempertahankan struktur militernya saat ini. Jumlah penduduk laki-laki Korea Selatan yang mampu mendaftar di militer diperkirakan akan turun menjadi 225.000 pada tahun 2025, sebelum turun menjadi 161.000 pada tahun 2038. Hal tersebut akan memberikan tekanan kepada Korea Selatan dalam menciptakan keamanan Negara dari sekutu seperti Amerika Serikat yang saat ini memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan. (Xinhua, 2019)

Sebagai negara dengan jumlah pendapatan terbesar ke-empat di Asia setelah Jepang, China dan India krisis demografi tersebut tentu saja dapat mengancam eksistensi Korea Selatan di mata dunia. Menurut Hong Nam Ki, Menteri Ekonomi dan Keuangan krisis demografi yang dihadapi Korea Selatan menimbulkan ancaman besar yang merusak potensi pertumbuhan Korea Selatan dan pertumbuhan berkelanjutan (Asianews, 2019). Sejak menjabat sebagai presiden pada tahun 2017, Moon Jae In ditekan dengan urgensi penyelesaian krisis demografi di Korea Selatan. Strategi Moon Jae In dalam menyelesaikan permasalahan demografi di Korea Selatan yang belum dapat

terselesaikan menarik penulis untuk membahas lebih dalam mengenai strategi apa yang dilaksanakan oleh Presiden Moon Jae In dalam menghadapi krisis demografi di Korea Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu "Bagaimana strategi Presiden Moon Jae In dalam menyelesaikan krisis demografi di Korea Selatan?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba menjawab dengan menggunakan Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*), dimana teori ini memuat mengenai proses pembangunan internasional melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia. Penulis juga menggunakan Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan (*People Centered Development Concept*).

### **1. Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*)**

Pendekatan teori pembangunan manusia dalam pembangunan internasional dikembangkan oleh Mahbub Ul Haq dengan didasari oleh karya dari Amartya Sen dalam *Development as Freedom* yang membahas tentang kemampuan atau kapabilitas manusia. *Human development* atau pendekatan pembangunan manusia memberikan penjelasan bahwa proses pembangunan, khususnya pembangunan internasional

merupakan proses melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian suatu negara. Pendekatan ini berfokus pada manusia, kesempatan dan pilihan yang dimilikinya. (UNDP, *About Human Development*, 2015).

Teori ini kemudian dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita (UNDP, *Human Development Report*, 1990). Sejumlah premis dasar dari teori pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan untuk mencapai pembangunan.

Amartya Sen mengatakan bahwa pembangunan ekonomi sudah seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses perluasan dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Ia mengamati bahwa masalah riil dari Negara yang sedang membangun adalah menurunnya kualitas kehidupan daripada rendahnya pendapatan. Ketika suatu negara mengalami transisi perubahan ekonomi, aspek lainnya juga akan mengikuti transisi perubahan tersebut. Kasus tersebut terjadi di Korea Selatan, dimana Korea Selatan mengalami transisi demografi. Transisi demografi sendiri artinya populasi yang tidak stabil ketika suatu negara menjadi lebih kaya (Quick, 2019). Walaupun pendapatan di Korea Selatan membaik, tapi kualitas hidup masyarakatnya belum tentu ikut membaik.

Sesuai dengan teori pembangunan manusia, pembangunan tidak hanya

berfokus pada pembangunan ekonomi saja tapi juga berfokus pada pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai skala pembangunan yang lebih baik. Hal tersebutlah yang menjadi poros Moon Jae In untuk mengatasi krisis demografi di Korea Selatan, yaitu dengan mencoba untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disana.

Strategi yang dilaksanakan Moon Jae In didasari oleh 2 dimensi yang dicakup oleh *human development*. Dimensi yang dicakup oleh *human development* dibagi menjadi 2 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu secara langsung meningkatkan kemampuan manusia yang meliputi indeks harapan hidup, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dimensi yang kedua yaitu menciptakan kondisi untuk pembangunan manusia yang meliputi partisipasi dalam ranah politik, ketahanan lingkungan, perlindungan dan hak asasi manusia, serta kesetaraan gender. Jadi secara keseluruhan, *human development* mencoba untuk membentuk pembangunan yang berorientasi pada manusia. Setelah semua hal tersebut tercapai dalam pembangunan, maka akan terbuka kesempatan untuk meraih kemajuan pada aspek hidup lainnya.

## **2. Konsep Pembangunan Berwawasan**

### **Kependudukan (*People Centered Development Concept*)**

*People centered development* atau pembangunan berwawasan kependudukan merupakan suatu konsep yang dicetuskan dalam *International Conference on Population and Development* (ICPD). Konferensi ini digagas oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) di Kairo, Mesir pada 5-13 September 1994. ICPD merupakan hal yang bersejarah dalam permasalahan kependudukan dan pembangunan dunia. Sebanyak 179 perwakilan negara menyepakati sebuah dokumen yang dijadikan dasar aksi atau program dalam mencapai tujuan konferensi ini. Tujuan utama konferensi ini diantaranya adalah : 1. Membarikan akses terbuka bagi keluarga berencana, hak-hak reproduksi, serta kesehatan reproduksi dan seksual (SRH). 2. Menciptakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. 3. Menanggulangi dampak individu, sosial, dan ekonomi dari migrasi. 4. Mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), termasuk isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan perubahan populasi. Dokumen ICPD sendiri terdiri dari 15 pasal yang

selanjutnya dijabarkan menjadi 16 POA (*Plane of Actions*) yang dirincikan dalam 44 dimensi. Dokumen tersebut dilakukan evaluasi setiap 10 tahun sekali yaitu pada 2004 dan 2014. Evaluasi tersebut dilakukan karena keadaan dunia selalu berubah. Oleh karena itu isi dari dokumen ICPD perlu menyesuaikan. (Tjiptoherijanto, 2010)

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep dimana penduduk merupakan sentral pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek. Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebagai objek, penduduk juga harus dapat menikmati pembangunan yang bersangkutan. Konsep kebijakan pembangunan ini terdiri dari *population responsive policy* (kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan), dan *population influencing policy* (kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang diinginkan). (Tjiptoherijanto, 2010) Contoh konsep *population-responsive policy* yang mampu diaplikasikan di Korea Selatan adalah: 1. Jumlah populasi remaja harus direspon oleh pemerintah dengan program

pendidikan dan kesehatan reproduksi remaja 2. Penduduk lansia dengan jumlah besar direspon dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. 3. Menciptakan kesetaraan gender pada lingkungan pekerjaan.

## **Pembahasan**

Ketika suatu negara mengalami perubahan ekonomi, efek transisi bukan hanya mempengaruhi bidang finansial namun juga memiliki efek yang besar pada bidang populasi. Hal tersebutlah yang terjadi di Korea Selatan dimana selama tiga generasi terakhir, Korea Selatan telah mengalami perubahan ekonomi karena industrialisasi. Perubahan ekonomi Korea Selatan akhirnya juga mengubah populasinya, dengan sangat cepat, Korea Selatan mengalami paradoks populasi.

Paradoks populasi yang dialami oleh Korea Selatan ialah kurangnya populasi penduduk atau krisis demografi. (Quick, 2019)

Penyebab krisis demografi yang pertama ialah, Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia. Rata-rata wanita Korea Selatan hanya memiliki 1,1 anak, lebih rendah dari negara lain. (Sebaliknya, rata-rata global adalah sekitar 2,5 anak.) Angka ini telah menurun dengan cepat: antara awal 1950-an dan hari ini, tingkat kesuburan di Korea Selatan turun dari 5,6 menjadi 1,1 anak per wanita. Perempuan di Korea Selatan makin menunda pernikahan untuk lebih mementingkan karir dan pendidikan yang lebih tinggi. Data terakhir menyatakan bahwa lebih dari 30% dari perempuan yang melahirkan

pada tahun 2018 berumur 35 tahun keatas. (Quick, 2019)

Bagaimana hal tersebut memengaruhi populasi masa depan negara? Ini sebenarnya adalah paradoks populasi untuk masyarakat yang cepat menua. Faktor kunci dalam stabilisasi populasi adalah 'tingkat penggantian': titik di mana jumlah total anak yang lahir per wanita dalam suatu populasi secara tepat menyeimbangkan jumlah kematian generasi tua. Angka yang sesuai untuk stabilisasi populasi ini adalah 2.1 - yang berarti bahwa tingkat kesuburan di Korea Selatan tidak mencapai tingkat penggantian. Dengan kata lain, wanita tidak memiliki cukup anak di Korea Selatan untuk menstabilkan populasinya. (Matsuda, 2020)

Para ahli menyatakan penyebab rendahnya angka kesuburan di Korea

Selatan adalah tingginya pengeluaran dalam hal pemeliharaan anak, tingginya angka pengangguran bagi anak muda dan beban berat bagi ibu yang bekerja dan masih harus menanggung pekerjaan rumah tangga. Pendidikan dan pekerjaan yang sangat kompetitif juga menjadi faktor dibalik rendahnya tingkat kesuburan. *"This [Korean] society is just way too competitive. I don't think it's right for any child to go through this system,"* seorang perempuan korea berusia 34 tahun kepada the *Agence France-Presse*. (Fensom, 2019)

Sekitar 56 persen perempuan berumur 15-64 bekerja di Korea Selatan, dibawah rata-rata OECD yang hampir berada diangka 60 persen, dan 72-75 persen di Denmark dan Swedia, dimana tingkat kelahirannya merupakan

salah satu yang tertinggi dinegara maju. Perekrut pekerjaan menyatakan bahwa perempuan muda yang sudah menikah memiliki kesempatan lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya diskriminasi. Pada November, Mahkamah Agung memberi hukuman selama 4 tahun kepada mantan CEO Pengadilan Keamanan Gas Korea yang dikelola negara (*state-run Korea Gas Safety Corp*) karena memanipulasi nilai interview calon pekerja untuk menolak adanya pendaftar perempuan dari proses perekrutan. Selain itu, tak satu pun dari sembilan anggota dewan di Hyundai Motor Co (005380.KS) adalah wanita. (Fensom, 2019)

*“The whole period of before, during and after childbirth weighs on our career,”* kata asisten manager perempuan di Hyundai Motor. Kesenjangan upah antara laki-laki

dan perempuan membuat perempuan semakin kesulitan, tambahnya.

Kesenjangan upah gender di Korea Selatan adalah yang tertinggi diantara negara maju pada 34.6 persen, diatas rata-rata OECD yaitu 13.8 persen. (Roh J. , 2019) Dengan tingginya kesenjangan upah gender di OECD, perempuan di Korea Selatan sulit untuk menempati jabatan tinggi dalam karir dan harus keluar dari pekerjaan karena pernikahan, kelahiran anak dan mengasuh anak. (Fensom, 2019)

Penyebab krisis demografi di Korea Selatan yang kedua ialah karena fenomena *Single in Sampo Generation*. Wanita Korea Selatan tidak hanya memilih untuk memiliki anak lebih sedikit - beberapa memilih untuk melepaskan hubungan romantis sepenuhnya. Semakin banyak yang memilih untuk tidak menikah sama

sekali, dan bahkan hubungan kasual. Pergeseran ini merupakan bagian dari fenomena sosial yang meningkat di Korea Selatan: Generasi Sampo. Kata 'sampo' berarti menyerahkan tiga hal: hubungan, perkawinan dan anak-anak. (Quick, 2019)

Statistik mencerminkan perubahan dramatis dalam budaya: tingkat perkawinan di antara orang Korea Selatan pada usia subur - baik pria maupun wanita - telah anjlok selama empat atau lima dekade terakhir. Dalam sensus 2015, kurang dari seperempat (23%) wanita Korea Selatan berusia 25 hingga 29 tahun mengatakan mereka menikah, turun tajam dari 90% pada tahun 1970. (Quick, 2019)

Ada juga kecenderungan yang meningkat di antara pria dan wanita untuk menunda atau menghindari pernikahan di kedua negara. Pada

2018, mayoritas warga Korea Selatan berusia 20 hingga 44 tahun masih lajang, menurut Institut Kesehatan dan Sosial Korea (KIHSA). Di antara mereka yang tidak berkencan, 51% pria dan 64% wanita mengatakan mereka memilih untuk tetap melajang. (Quick, 2019)

Banyak dari anak muda Korea Selatan ini mengatakan mereka tidak punya waktu, uang, atau kapasitas emosional untuk berkencan. Mereka bersaing dengan meningkatnya tingkat pengangguran di pasar kerja yang sangat kompetitif - yang berarti banyak menghabiskan waktu luang mereka di sekolah dan untuk mendapatkan sertifikat tambahan atau keterampilan profesional. (Kwon J. , 2019)

Beberapa kelas perguruan tinggi dan pendidik berusaha mengajarkan siswa tentang kencan,

cinta dan seks dalam upaya untuk membalikkan budaya terhadap kencana - bahkan menugaskan siswa untuk berkencana. (Kwon J. , 2019)

Akibat yang dihadapi oleh Korea Selatan karena krisis tersebut ditunjukkan oleh data demografis negara yang menunjukkan bahwa Korea Selatan berada di ambang era penurunan populasi. Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, populasi negara ini turun 1.566 menjadi 51.849 juta pada Desember, dibandingkan dengan angka bulan sebelumnya 51.851 juta. (Se, 2020)

Ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun sejak April 2009 (ketika diposting minus 2.716) bahwa angka bulanan turun. Sementara penurunan pada bulan April 2009 adalah kejadian sporadis, angka pada bulan Desember 2019

menandakan penurunan terus menerus di tahun-tahun dan dekade mendatang. (Se, 2020)

Perkiraan di antara beberapa analisis tentang penurunan bertahap di masa mendatang datang dari fakta bahwa populasi pria telah menurun untuk pertama kalinya dalam sejarah pada tahun 2019 secara tahunan sejak pemerintah mulai mengumpulkan data. Jumlah populasi pria turun 1.313 pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara khusus, angka bulanan turun untuk bulan kelima berturut-turut - minus 261 pada bulan Agustus, minus 354 pada bulan September, minus 844 pada bulan Oktober, minus 575 pada bulan November dan minus 1.788 pada bulan Desember. (Se, 2020)

Meskipun peningkatan terus-menerus dalam populasi wanita terus mengimbangi angka pria, jumlah

wanita juga miring ke arah perlambatan pertumbuhan secara bulanan - 2.069 pada September, 2.296 pada Oktober, 2.296 pada Oktober, 1.297 pada November dan hanya 222 pada Desember. Populasi perempuan belum memposting angka minus bahkan ketika pertumbuhan negatif untuk seluruh populasi dilaporkan dua kali sebelumnya - pada bulan April 2009 dan pada bulan Maret 2008 - selama dekade terakhir. Kedua kasus tersebut dipimpin oleh penurunan jumlah pria. (Se, 2020)

Data tersebut diambil dari tujuh kota besar - Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju dan Ulsan - jumlah penduduk laki-laki turun di semua kota pada bulan Desember, dan populasi perempuan turun di enam wilayah kecuali Incheon. (Se, 2020)

Daegu merupakan wilayah yang mempunyai angka yang dihitung minus 3.550 (minus 2.032 untuk pria dan minus 1.518 untuk wanita), diikuti oleh Seoul dengan minus 3.470 (minus 2.577 dan minus 893), Busan dengan minus 2.880 (minus 1.748 dan minus 1.132), Gwangju dengan minus 2.447 (minus 1.428 dan minus 1.019) dan Daejeon dengan minus 2.085 (minus 1.000 dan minus 1.085). (Se, 2020)

Penurunan besar di Seoul dan enam kota metropolitan lainnya disebabkan oleh beberapa warga yang berbondong-bondong pergi ke perumahan baru di Provinsi Gyeonggi dan Sejong, sebuah kota berorientasi administrasi yang dikembangkan pada tahun 2012. Gyeonggi (penduduk nomor satu di negara ini) dan Sejong melihat jumlah penduduk terdaftar naik 11.489 (5.424 untuk

pria 6.065 untuk wanita) dan 1.928 (929 dan 999), masing-masing, bulan lalu. (Se, 2020)

Meskipun demikian, gejala-gejala penurunan nasional yang melibatkan wilayah provinsi telah muncul karena tingkat perkawinan yang terus menurun dan tingkat kesuburan terendah di dunia. Data Kementerian menunjukkan bahwa jumlah persalinan bertahan di 24.254 (12.422 anak laki-laki dan 11.832 anak perempuan) pada bulan Desember, dibandingkan dengan 37.028 (18.986 dan 18.042) lima tahun sebelumnya pada tahun 2014. (Se, 2020)

Jumlah orang berusia 65 atau lebih, yang disebut senior, di Korea melampaui angka 8 juta untuk pertama kalinya mencapai 8,02 juta pada bulan lalu, yang mengambil 15,5 persen dari populasi. Korea Selatan,

yang digolongkan sebagai masyarakat lanjut usia pada tahun 2000, di mana proporsi manula mencapai 7 persen, dan diklasifikasikan sebagai masyarakat lanjut usia pada tahun 2017 dengan persentase mereka mencapai 14 persen. (Se, 2020)

Usia rata-rata orang Korea telah mencapai 42,6 (41,5 untuk pria dan 43,8 untuk wanita). Ini lebih tua dari 40 (38,9 dan 41,2) pada Desember 2014 dan 37,5 (36,4 dan 38,7) pada Desember 2009. Bulan lalu, jumlah orang berusia di bawah 9 (4,16 juta) kurang dari setengah dari mereka yang berusia antara 50-59 (8,66 juta) atau hanya dua pertiga dari mereka yang berusia antara 60-69 (6,31 juta). (Se, 2020)

Krisis demografi di Korea Selatan telah berusaha diselesaikan oleh presiden sebelum Moon Jae In. Presiden Kim Dae-jung pada akhir

1990-an telah mencoba menghadapi perubahan demografis ini. Kim menciptakan Kementerian Kesetaraan Gender (sekarang disebut Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga) untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan yang dibentuk oleh tradisi hierarkis kuno laki-laki berada di atas perempuan. Kementerian tersebut di pemerintahan telah mengeluarkan banyak uang untuk masalah ini. (Roh J. , 2019)

Pada masa pemerintahan Park Geun-hye, beliau mengeluarkan website berisi informasi kelahiran berdasarkan wilayah, seolah-olah berusaha menggerakkan daya saing dalam hal reproduksi. Strategi tersebut dilaksanakan Park Geun Hye dengan harapan meningkatkan persaingan dalam hal reproduksi antar

wilayah. Strategi tersebut tidak berujung baik dengan ditutupnya website tersebut karena keluhan wanita di Korea Selatan yang menganggap Park Geun Hye hanya melihat wanita sebagai “pabrik pembuat bayi”. (Roh J. , 2019)

Pada tahun 2018, pengeluaran pemerintah untuk memerangi angka kelahiran rendah adalah sekitar \$ 25 miliar, Reuters baru-baru ini melaporkan, angka tersebut hampir setengah dari tingkat pengeluaran Korea Selatan untuk bidang pertahanan. Hal tersebut tidak memberi banyak efek perbedaan, sebagian besar karena pemerintah lebih fokus pada penyebab kecil daripada yang lebih besar. Misalnya, pemerintah lebih memusatkan perhatian pada memberikan biaya subsidi terhadap biaya anak. Namun pemerintah tidak menekan bisnis

Korea Selatan untuk mempertahankan dan mempromosikan pekerja perempuan. (Levkowitz, 2019)

Dengan media Korea mengklaim baby bust sebagai "risiko yang lebih besar daripada krisis mata uang," Seoul menanggapi dengan menghabiskan sekitar 117 triliun won (\$ 97 miliar) antara 2016 dan 2018 pada langkah-langkah yang bertujuan mengangkat angka kelahiran. Ini termasuk memperkenalkan cuti hamil berbayar, memberikan subsidi untuk perawatan kesuburan, perawatan medis gratis untuk bayi dan subsidi perawatan anak. (Levkowitz, 2019)

Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah mencoba selama bertahun-tahun untuk memprakarsai kebijakan baru yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kelahiran negara itu, termasuk menambah

manfaat finansial yang diberikan kepada keluarga dengan anak-anak. Masalahnya adalah bahwa manfaat-manfaat ini tidak mencakup pengeluaran kritis seperti biaya pendidikan dalam masyarakat yang kompetitif seperti Korea Selatan. Masalah lain adalah hambatan yang ada di jalur wanita yang ingin kembali bekerja setelah melahirkan. Pekerjaan paruh waktu untuk ibu yang bekerja, serta pekerjaan yang memungkinkan seseorang bekerja dari rumah, sangat sulit ditemukan di Korea Selatan. (Levkowitz, 2019)

"Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi, kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi perempuan, melonggarkan kebijakan imigrasi, dan selanjutnya mengembangkan lingkungan investasi ramah yang mencakup deregulasi dan

menciptakan industri baru," kata Hong.

### **1. Strategi Pemerintah dalam Bidang Ekonomi**

Pada masa pemerintahan sebelumnya bentuk finansial saja dianggap kurang efektif dalam meningkatkan jumlah penduduk di Korea Selatan, akhirnya pada masa pemerintahan Moon Jae In, pemerintah memangkas anggaran untuk menaikkan angka kelahiran menjadi di bawah \$ 20 miliar. Pada bulan Desember, Komite Presidensial untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan mengatakan akan mengubah arah untuk fokus pada "meningkatkan kualitas hidup setiap generasi", menurut Yonhap, daripada berfokus pada biaya yang dihadapi oleh orang tua dari anak. Hal yang lebih diutamakan oleh pemerintahan Moon

ialah diharapkan akan ada lebih banyak tenaga kerja perempuan yang mempertahankan keinginan untuk memiliki anak. Tujuan berikutnya adalah untuk mendapatkan lebih banyak pria Korea yang mengambil cuti ayah secara dibayar yang secara hukum dapat mereka dapatkan ketika seorang anak lahir. (Ramstad, 2019)

Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In mengumumkan serangkaian langkah-langkah untuk menghapus penyebab mendasar yang dikutip dari penurunan angka kelahiran di negara itu, termasuk tingginya biaya membesarkan anak dan meningkatnya jumlah orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Krisis ini dicoba diselesaikan saat Kim Sang-hee, wakil ketua komite kepresidenan yang bertujuan menangani masyarakat dengan angka

kelahiran rendah dan usia lanjut. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengatakan rencana baru pemerintah adalah mengubah paradigma kebijakannya untuk fokus pada peningkatan kualitas hidup setiap generasi dan mengatasi masalah dalam jangka panjang. "Kebijakan ini adalah fokus memberi harapan kepada orang berusia 20-an hingga 40-an dan memastikan bahwa kualitas hidup mereka tidak jatuh ketika memilih menikah dan melahirkan," kata Kim. Kementerian mengatakan negara akan bertanggung jawab atas biaya medis untuk bayi berusia kurang dari satu tahun mulai tahun depan. Pemerintah berencana untuk memberikan manfaat yang sama kepada anak-anak pra-sekolah pada tahun 2025, kata para pembuat kebijakan. Saat ini, pemerintah membayar subsidi bulanan kepada 90

persen keluarga, tidak termasuk golongan penghasilan 10 persen teratas. Manfaat tidak mencakup sekitar 25.000 anak dari 2,53 juta. Mulai tahun depan, manfaatnya akan diperluas ke setiap rumah tangga terlepas dari pendapatan orang tua, dengan rencana jangka panjang untuk meningkatkan subsidi. Dalam upaya membantu pasangan yang sulit hamil, pemerintah akan memperluas subsidi untuk perawatan infertilitas. Kementerian mengatakan penduduk dapat membayar kurang dari 30 persen biaya medis untuk perawatan infertilitas, yang didalamnya termasuk tiga sesi inseminasi buatan dan maksimum empat sesi pemupukan eksternal, mulai tahun depan. (Reuters, 2019)

Mulai paruh kedua tahun depan, orang tua dengan anak-anak di bawah delapan akan dapat bekerja

satu jam lebih sedikit setiap hari sehingga mereka dapat merawat anak-anak mereka. Juga, cuti ayah yang dibayar akan diperluas menjadi 10 hari dari 3 hari saat ini, kata para pejabat. Pemerintah mengatakan juga akan mendorong lebih banyak cuti ayah, dengan tujuan meningkatkan tingkat saat ini dari 13 persen menjadi 20 persen. Lebih banyak pria yang mengambil cuti paternitas saat ini, tetapi jumlah mereka masih sangat sedikit dibandingkan dengan wanita dan angka ini berada jauh di bawah negara maju lainnya, kata para pejabat di Korea Selatan. Kementerian mengatakan akan membangun lebih banyak pusat penitipan anak dengan tujuan mencapai proporsi anak-anak menggunakan taman kanak-kanak dan pusat penitipan anak nasional dan

publik sebesar 40 persen tahun depan. (Reuters, 2019)

Presiden Moon Jae-in sebelumnya menetapkan tujuan untuk memperluas dukungan pemerintah untuk orang tua dengan anak-anak, bersumpah untuk menciptakan lebih dari tiga kali lipat proporsi bayi dan balita. Seoul diharapkan fokus untuk memiliki 300.000 bayi baru lahir setiap tahun sebagai gantinya. "Tujuan kami difokuskan pada memelihara 300.000 bayi baru lahir setiap tahun. Sesuai dengan itu, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap rumah tangga dapat memiliki dua anak dengan menurunkan biaya medis dan mengurangi biaya membesarkan anak," Lee Chang-jun, seorang pejabat komite. (Reuters, 2019)

Selain itu dalam masalah pekerja migran secara global dan historis, pekerja migran telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Mereka terdiri dari tiga persen dari populasi dunia, tetapi berkontribusi lebih dari sembilan persen dari PDB global. Korea Selatan juga telah mengakui pentingnya tenaga kerja migran. Sejak awal 1990-an, negara ini telah mempekerjakan semakin banyak pekerja migran untuk bekerja keras di pabrik-pabrik, di lokasi-lokasi konstruksi dan pertanian. Pada tahun 2016, ada lebih dari satu juta migran yang aktif secara ekonomi. (Reuters, 2019)

Sejak 2010, negara itu telah menawarkan visa tinggal selama lima tahun kepada warga asing yang berinvestasi setidaknya 500 juta won (US \$ 434.000) dalam proyek real estat dan publik yang ditunjuk. Pada

akhir lima tahun, peserta dalam Skema Investor Imigran untuk Real Estat dan Skema Investor Imigran untuk Bisnis Publik dapat mengajukan permohonan tempat tinggal permanen. Pada tahun yang sama, pemerintah juga meluncurkan visa berbasis poin untuk migran yang sangat terampil, menawarkan jalur langka ke tempat tinggal permanen yang tidak terikat dengan pernikahan. Dan, pada 2013, pemerintah memperkenalkan visa awal yang berdedikasi, melonggarkan pembatasan yang sebelumnya mengharuskan pengusaha asing untuk berinvestasi setidaknya 100 juta (US \$ 86.000) di negara itu. (Reuters, 2019)

Hingga masa pemerintahan Moon Jae In kemudahan terus diberikan bagi pekerja migran. Beberapa perbaikan dilakukan sejak

2017 dalam jam kerja yang panjang dan kondisi upah sehingga jumlah pekerja asing Korea Selatan pada tahun 2018 naik 50.000 dari tahun sebelumnya, sebagian besar berkat pekerjaan di bidang manufaktur dan posisi tenaga kerja sementara atau harian. (Reuters, 2019)

Pada tahun 2060, Korea Selatan mungkin membutuhkan sebanyak 15 juta imigran untuk mempertahankan pertumbuhan. Pada tahun 2065, lebih dari 40 persen populasi akan berusia di atas 65 tahun. Saat ini, lima pekerja mendukung satu lansia dengan membayar dana pensiun nasional; dalam 50 tahun, rasionya adalah 1: 1. Dengan konteks ini, pekerja migran adalah solusi jangka panjang untuk defisit demografis Korea Selatan, bukan celah sementara untuk kekurangan tenaga kerja yang akan

dibuang kemudian. Pemerintah harus mendukung integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberi mereka jalan menuju kewarganegaraan. (Reuters, 2019)

## **2. Strategi Pemerintah dalam Bidang Kesetaraan Gender**

Kementerian mengatakan akan memfokuskan perubahan kebijakannya pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan untuk tetap bekerja bahkan jika mereka memiliki anak. Kebijakan kompatibilitas pekerjaan dan rumah Korea Selatan perlu ditingkatkan lebih lanjut bagi perempuan untuk melanjutkan karir mereka. Menurut data, sekitar 56 persen perempuan berumur 15-64 bekerja di Korea Selatan, dibawah rata-rata OECD yang hampir berada diangka 60 persen, dan 72-75 persen di Denmark dan Swedia, dimana

tingkat kelahirannya merupakan salah satu yang tertinggi dinegara maju. Perekrut pekerjaan menyatakan bahwa perempuan muda yang sudah menikah memiliki kesempatan lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya diskriminasi. "Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja masih merupakan masalah serius di masyarakat kita," kata Lee, mencatat kelahiran anak sering kali berujung pada berakhirnya karir kerja bagi pekerja perempuan. (Yonhap, 2018)

Sebelumnya, diluncurkannya Pemerintahan baru pada tahun 1998, Komisi Presiden untuk Urusan Perempuan dibentuk untuk menangani masalah-masalah yang secara khusus melibatkan perempuan. Komisi ini diangkat dan diperluas menjadi Kementerian Kesetaraan Gender pada Januari

2001. Kementerian yang baru ini menetapkan 20 tugas khusus yang harus dicapai dalam enam bidang dasar. Bidang-bidang ini adalah: untuk merevisi dan menetapkan undang-undang dan peraturan yang melibatkan diskriminasi di sektor apa pun dan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, untuk memfasilitasi pekerjaan perempuan dan memberikan dukungan bagi pekerja perempuan, untuk meningkatkan peluang pendidikan bagi perempuan agar kompetitif di pasar tenaga kerja, untuk memberikan kebijakan kesejahteraan sosial bagi perempuan, untuk mempromosikan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial termasuk pekerjaan sukarela dan kegiatan organisasi perempuan, dan untuk memperkuat kerja sama organisasi

perempuan Korea dengan organisasi perempuan internasional. Kementrian akan terus mencoba untuk menerapkan 20 tugas khusus untuk mencapai kesetaraan gender di Korea Selatan. ((KOIS), 2020)

Presiden Moon Jae-in, mendeskripsikan dirinya sebagai presiden feminis, dengan menguji sudut pandang baru: menunjukkan pada wanita lebih banyak rasa hormat. Pemerintahan Moon telah berupaya untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pemerintahan, pemerintah telah menetapkan tujuan-tujuan seperti perempuan bertanggung jawab atas 10 persen posisi di pemerintahan dan 20 persen eksekutif di perusahaan publik pada 2022. Selain itu, Korea Selatan juga mengumumkan rencana untuk menghapus beberapa halangan untuk mempekerjakan perempuan,

yang memungkinkan kedua orang tua untuk mengambil cuti orang tua pada saat yang sama dan memperpanjang cuti ayah yang dibayar. Pengusaha juga mendapat insentif untuk mengizinkan orang tua bekerja lebih sedikit. Presiden Moon Jae In juga memotong jam kerja di Korea dari 68 jam menjadi 52 jam. Perusahaan Samsung juga secara aktif merekrut pekerja wanita dan memiliki lebih banyak karyawan wanita daripada Apple. (Yonhap, 2018)

"Upaya kesetaraan gender sangat tepat untuk menyelesaikan krisis kependudukan," kata Shin Eun-Kyung, seorang ekonom dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Jika Korea Selatan mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan ke tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada tahun 2035, itu akan

menimbulkan pertumbuhan PDB riil 7 persen menurut IMF. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat signifikan, karena kira-kira sama dengan apa yang dikeluarkan Korea Selatan untuk perawatan kesehatan. (Reuters, 2019)

### **3. Strategi Pemerintah dalam Bidang Militer**

Penurunan angka kelahiran Korea juga tercermin dalam penurunan tahunan jumlah kandidat yang mengikuti ujian universitas nasional, Tes Kemampuan Skolastik Perguruan Tinggi (CSAT). Jumlah kandidat CSAT pada 2018 lebih rendah hampir 250.000 dari jumlah kandidat pada pertengahan 1990-an, dengan penurunan hampir 30%. Penurunan jumlah peserta ujian menunjukkan tren lanjutan dalam jumlah siswa potensial, tentara, anggota angkatan kerja, dan

konsumen. Penurunan jumlah mahasiswa akan mempengaruhi jumlah insinyur, dokter, dan tentara yang menyediakan layanan penting bagi masyarakat. (Levkowitz, 2019)

Saat ini, semua pria Korea Selatan yang berbadan sehat harus melakukan wajib militer selama sekitar dua tahun. Penurunan populasi akhirnya ikut mempengaruhi sistem pertahanan di Korea Selatan. Angka kelahiran rendah di negara itu kemungkinan akan menyebabkan penurunan jumlah warga pria berusia 20-an menjadi kurang dari 250.000 setelah 2022, dibandingkan dengan sekitar 350.000 pada 2017, menurut data pemerintah. (Tae, 2019)

Karena berkurangnya sumber daya manusia, hal tersebut mendesak pemerintah untuk meningkatkan sistemnya untuk memperoleh

personil militer. Jumlah orang yang harus melayani militer diproyeksikan turun menjadi 230.000 pada 2025 sebelum turun menjadi kurang dari 200.000 setelah 2037, dibandingkan dengan 350.000 pada 2018. Korea Selatan berencana mengurangi jumlah pasukan menjadi 500.000 pada 2022 dari 599.000 pada 2018, menurut buku putih pertahanan 2018 yang dirilis pada bulan Januari. Sebagai perbandingan, surat kabar itu menyebutkan jumlah personel aktif-tugas di Korea Utara adalah 1,28 juta. Langkah ini sejalan dengan reformasi pertahanan di mana pemerintah berupaya mengurangi jumlah pasukan untuk mengatasi lebih sedikit calon wajib militer dan persyaratan layanan wajib yang lebih pendek untuk wajib militer. (Tae, 2019)

Pemerintah berencana untuk memotong jumlah pasukan tetap yang bertugas aktif sambil mereformasi militer dengan cara yang memanfaatkan teknologi seperti drone yang dipersenjatai dan satelit pengintaian. Untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di masa depan, Angkatan Darat bersumpah untuk memanfaatkan teknologi terbaru seperti sistem senjata canggih yang akan digunakan untuk perang laser, cyber, dan elektronik, sistem berbasis kecerdasan buatan, sistem artileri super-panjang dan kendaraan penerbangan mobilitas tinggi. (Tae, 2019)

Pihak militer Korea Selatan mengatakan bahwa mereka membentuk sebuah komite ilmu pengetahuan dan teknologi awal tahun ini untuk penelitian dan pengembangan bersama dengan

badan-badan pemerintah dan perusahaan-perusahaan pertahanan utama. Berdasarkan hasilnya, mereka akan menyusun persyaratan militer yang terperinci. Sebagai bagian dari upaya tersebut, agen pengadaan senjata meluncurkan proyek untuk mengembangkan sistem senjata laser yang dirancang untuk meluncurkan serangan presisi terhadap kendaraan udara tak berawak kecil pada tahun 2023. Militer Korea Selatan juga mengamati penyebaran operasional yang disebut "dronebot" sekitar 2021. (Tae, 2019)

Pemerintah juga mempertimbangkan mandat bahwa warga Korea Selatan yang dinaturalisasi harus mengikuti wajib militer. Jumlah orang asing yang dinaturalisasi telah melampaui 10.000 setiap tahun dalam beberapa tahun

terakhir, dengan 11.270 pada 2013, 10.924 pada 2015 dan 10.086 pada 2017, menurut data pemerintah. Korea Selatan dalam menghadapi populasi yang menyusut dan sebagai bagian dari inisiatif reformasi berharap untuk menciptakan militer yang lebih kecil namun lebih efektif dan pintar. (Agency, 2019)

### **Kesimpulan**

Sejak tahun 1960, Korea Selatan mengalami kurangnya populasi penduduk atau krisis demografi. Isu ini telah menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Korea Selatan hingga era pemerintahan Moon Jae In karena belum ditemukan penyelesaian yang efektif untuk menangani krisis tersebut. Masyarakat Korea telah mengalami transformasi besar sejak tahun 1960. Keajaiban ekonomi,

transisi demografis, urbanisasi, perubahan dalam kehidupan keluarga, dan pembentukan masyarakat sipil merupakan fitur utama dari transformasi. Sebelum ekonomi Korea bangkit dari stagnasi tradisionalnya, Korea adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan sedikit sumber daya alam dan tekanan populasi yang berkembang pesat. Pada saat krisis ini, negara ini memulai perjalanannya menuju pembangunan dan modernisasi.

Transisi demografis Korea dimulai pada awal abad ke-20 dengan diperkenalkannya sistem medis dan kesehatan Barat. Angka kematian menurun, dan harapan hidup orang Korea meningkat dari 37 tahun menjadi 52 tahun. Peningkatan tingkat pertumbuhan populasi memperburuk tekanan pada sumber daya lahan. Menanggapi tekanan

populasi yang tinggi ditambah dengan kemiskinan yang ekstrim, pemerintah menjadi lebih terlibat dalam keluarga berencana. Fertilitas mulai menurun dengan cepat pada pertengahan 1960-an. Fertilitas terus menurun sehingga tingkat kesuburan tahun 2000 harus mengarah pada pengurangan populasi 30% dalam 30 tahun.

Dengan adanya transisi kesuburan, angka kematian di Korea Selatan ikut menurun. Harapan hidup saat lahir diperkirakan 52,4 tahun pada 1960 dan mencapai 75,5 tahun pada 1999. Penuaan populasi adalah akibat langsung dari tren demografis ini. Proporsi populasi berusia 65 dan lebih tua adalah 2,9% pada tahun 1960, dan meningkat menjadi 5,1% pada tahun 1990, dan menjadi 7,2% pada tahun 2000. Penurunan kesuburan juga membawa pengurangan signifikan dalam ukuran

keluarga. Ukuran rumah tangga rata-rata menurun dari 5,5 menjadi 3,3 orang antara tahun 1960 dan 1995.

Ketika suatu negara mengalami perubahan ekonomi, efek transisi bukan hanya mempengaruhi bidang finansial namun juga memiliki efek yang besar pada bidang populasi. Hal tersebutlah yang terjadi di Korea Selatan dimana selama tiga generasi terakhir, Korea Selatan telah mengalami perubahan ekonomi karena industrialisasi. Perubahan ekonomi Korea Selatan akhirnya juga mengubah populasinya, dengan sangat cepat, Korea Selatan mengalami krisis demografi.

Penyebab krisis demografi yang pertama ialah, Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia. Rata-rata wanita Korea Selatan hanya memiliki 1,1 anak, lebih rendah dari negara lain.

(Sebaliknya, rata-rata global adalah sekitar 2,5 anak.) Angka ini telah menurun dengan cepat: antara awal 1950-an dan hari ini, tingkat kesuburan di Korea Selatan turun dari 5,6 menjadi 1,1 anak per wanita. Penyebab krisis demografi di Korea Selatan yang kedua ialah karena fenomena *Single in Sampo Generation*. Wanita Korea Selatan tidak hanya memilih untuk memiliki anak lebih sedikit - beberapa memilih untuk tidak menikah sama sekali. Pergeseran ini merupakan bagian dari fenomena sosial yang meningkat di Korea Selatan: *Generasi Sampo*. Kata 'sampo' berarti menyerahkan tiga hal: hubungan, perkawinan dan anak-anak. (Quick, 2019) Penyebab krisis demografi di Korea Selatan yang ketiga ialah *Extraordinary longevity*. Perbaikan dalam perawatan kesehatan umumnya mengarah ke populasi

dengan umur panjang. Hal tersebutlah yang terjadi di Korea Selatan, di mana harapan hidup telah meningkat dengan cepat di paruh kedua abad ke-20 di tengah industrialisasi. Saat ini, Korea Selatan sekarang merupakan negara dengan salah satu harapan hidup tertinggi di dunia.

Krisis demografi tersebut akhirnya mampu menciptakan krisis perekonomian bagi Korea Selatan pada masa mendatang. Masyarakat lanjut usia di Korea Selatan mampu menyeret pertumbuhan investasi dan produktivitas, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan PDB. Penuaan populasi cenderung membuat negara kurang produktif. Banyak orang tua yang pensiun, yang berarti mereka tidak lagi berkontribusi banyak pada produksi ekonomi, dapat memperlambat pertumbuhan output per kapita. Dan

ketika rasio pensiunan terhadap pekerja tumbuh, setiap pekerja harus menghabiskan lebih banyak uang, waktu dan upaya untuk mendukung pasukan lansia yang semakin bertambah. Selain itu di Korea Selatan, warga negara yang berbadan sehat yang berusia antara 18 dan 40 tahun diharuskan untuk bertugas di militer selama hampir dua tahun. Dengan krisis populasi yang meningkat dan secara teknis perang yang sedang berlangsung dengan Korea Utara, Korea Selatan akan mengalami kekurangan tenaga manusia.

Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In mengumumkan serangkaian langkah-langkah untuk menghapus penyebab mendasar dari penurunan angka kelahiran di negara itu. Kementerian mengatakan negara akan bertanggung

jawab atas biaya medis untuk bayi berusia kurang dari satu tahun mulai tahun depan. Pada bulan Desember, Komite Presidensial untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan mengatakan akan mengubah arah untuk fokus pada "meningkatkan kualitas hidup setiap generasi", menurut Yonhap. Hal yang lebih diutamakan oleh pemerintahan Moon ialah diharapkan akan ada lebih banyak tenaga kerja perempuan yang mempertahankan keinginan untuk memiliki anak. Tujuan berikutnya adalah untuk mendapatkan lebih banyak pria Korea yang mengambil cuti ayah secara dibayar yang secara hukum dapat mereka dapatkan ketika seorang anak lahir.

Kemudian, Kementerian mengatakan akan memfokuskan perubahan kebijakannya pada

penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan untuk tetap bekerja bahkan jika mereka memiliki anak. Kebijakan kompatibilitas pekerjaan dan rumah Korea Selatan perlu ditingkatkan lebih lanjut bagi perempuan untuk melanjutkan karir mereka. Selain itu, Pemerintah berencana untuk memotong jumlah pasukan tetap yang bertugas aktif sambil mereformasi militer dengan cara yang memanfaatkan teknologi seperti drone yang dipersenjatai dan satelit pengintaian untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di masa depan.

Strategi yang digunakan oleh Moon Jae In untuk menyelesaikan krisis di Korea Selatan dapat dianalisis berdasarkan teori *human development*. *Human development* atau pendekatan pembangunan manusia memberikan penjelasan

bahwa proses pembangunan, khususnya pembangunan internasional merupakan proses melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian suatu negara. Strategi yang dilaksanakan Moon Jae In didasari oleh 2 dimensi yang dicakup oleh *human development*. Dimensi yang pertama yaitu secara langsung meningkatkan kemampuan manusia yang meliputi indeks harapan hidup, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dimensi yang kedua yaitu menciptakan kondisi untuk pembangunan manusia yang meliputi partisipasi dalam ranah politik, ketahanan lingkungan, perlindungan dan hak asasi manusia, serta kesetaraan gender.

#### **Daftar Pustaka**

- Adriaan, G. (2011). *Koreans*. Brev Publisihing.
- Eggleston, K. (2011). *Aging Asia*. Shorenstein Asia-Pacific Research Center.
- Gietel, S. (2018). *Family Demography in Asia*. Hongkong: EE Publishing.
- Matsuda, S. (2020). *Low Fertility in Japan, South Korea, and Singapore*. Singapore: Springer Singapore.
- Rahm, L. (2019). *Gender-Biased Sex Selection in South Korea, India and Vietnam*. Springer.

- Sangcheol, K. (2016). *Geography of Korea*. Seoul: Seoul Selection.
- Stephen, E. H. (2019). *South Korea's Demographic Dividend: Echoes of the Past or Prologue to the Future?* (CSIS Reports). Washington, DC: Center for Strategic & International Studies.
- Tudor, D. (2012). *Korea: The Impossible Country: South Korea's Amazing Rise from the Ashes: The Inside Story of an Economic, Political and Cultural Phenomenon*. Tuttle Publishing.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis . *Language Teaching Research*.
- Tjiptoherijanto. (2010). Menuju Pembangunan Kawasan Berpendudukan. *Jurnal Populasi*.
- Yoo, S. H. (2018). DEMOGRAPHIC RESEARCH. <https://www.demographic-research.org/volumes/vol38/2/38-22.pdf>.
- (KOIS), K. O. (2020). *Women's Role in Contemporary Korea*. Hongkong: Asiasociety.org.
- Adriaan, G. (2011). *Koreans*. Brev Publisihing.
- Agency, Y. N. (2019). *S. Korean army to curtail forces by 100K amid shrinking population*. Seoul: Yonhap News.
- Asianews. (2019). *Seoul Announces New Measures To Counter Population Decline*. South Korea: asianews.it.
- Eggleston, K. (2011). *Aging Asia*. Shorenstein Asia-Pacific Research Center.
- Fensom, A. (2019). *Korea's Future Is Dying (Thanks to Demographics)*. Australia: nationalinterest.org.
- Gibson, J. (2018). *Five Priorities for South Korea's Moon Jae-in in 2019*. Chicago: thediplomat.com.

- Gietel, S. (2018). *Family Demography in Asia*. Hongkong: EE Publishing.
- Hwan, K. T. (2019). *Population Change and Development in Korea*. Hongkong: asiasociety.org.
- Kwon, J. (2019). *South Korea's fertility rate falls to record low*. Asia: edition.cnn.com.
- Kwon, T. H. (1975). *The Population of South Korea*. Seoul: The Population and Development Studies Center.
- Levkowitz, D. A. (2019). *The Low Birth Rate Is South Korea's Greatest Strategic Threat*. besacenter.org.
- Matsuda, S. (2020). *Low Fertility in Japan, South Korea, and Singapore*. Singapore: Springer Singapore.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis . *Language Teaching Research*.
- Quick, M. (2019). *South Korea's Population Paradox*. bbc.com.
- Rahm, L. (2019). *Gender-Biased Sex Selection in South Korea, India and Vietnam*. Springer.
- Ramstad, E. (2019). *South Korea's Demographic Troubles*. Washington: CSIS.org.
- Reuters. (2019). *South Korea's new solution to address plummeting birth rates: showing respect for women*. China: scmp.com.
- Roh, J. (2019). *Not a baby factory: South Korea tries to fix demographic crisis with more gender equality*. reuters.com.
- Roh, J. (2019). *With plan to show women more respect, South Korea tries to fix its demographic crisis*. Japan: japantimes.co.jp.
- Sangcheol, K. (2016). *Geography of Korea*. Seoul: Seoul Selection.
- Se, K. Y. (2020). *South Korea's population declines in*

- December. South Korea: koreaherald.com.
- Smith, N. (2019). *South Korea Foreshadows a Gray, Slow-Growth Future*. bloomberg.com.
- Stangarone, T. (2018). *North Korea Can't Solve South Korea's Demographic Crisis*. America: thediplomat.com.
- Stephen, E. H. (2012). Bracing for Low Fertility and a Large Elderly Population in. 4.
- Stephen, E. H. (2019). South Korea's Demographic Dividend: Echoes of the Past or Prologue to the Future? (CSIS Reports). Washington, DC: Center for Strategic & International Studies.
- Tae, K. K. (2019). *S. Korea unveils measures to cope with population decline*. Seoul: en.yna.co.kr.
- Tjiptoherijanto. (2010). Menuju Pembangunan Kawasan Berpendudukan. *Jurnal Populasi*.
- Tudor, D. (2012). *Korea: The Impossible Country: South Korea's Amazing Rise from the Ashes: The Inside Story of an Economic, Political and Cultural Phenomenon*. Tuttle Publishing.
- UNDP. (1990). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- UNDP. (2015). *About Human Development*. [hdr.undp.org/en/humandey](http://hdr.undp.org/en/humandey).
- Xinhua. (2019). *S.Korea to reduce number of troops to 500,000 by 2022*. China: xinhuanet.com.
- Yonhap. (2018). *Govt. to lower child-rearing expenses to tackle low birthrate*. Seoul: The Korea Herald.

